

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang ekonomi global selalu bertumbuh pesat. Seiring dengan berjalannya teknologi dan ilmu pengetahuan mengenai dunia ekonomi, memunculkan berbagai macam keilmuan baru yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun para pemilik bisnis. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pada dekade terakhir adalah aspek yang membahas mengenai non keuangan. Aspek ini meliputi tanggung jawab sosial (CSR), keberlanjutan lingkungan, serta *good governance* (Annisa dkk., 2024). Dengan kata lain aspek non keuangan merupakan konteks bisnis yang menjelaskan mengenai faktor-faktor keberlangsungan suatu usaha namun aspek tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan finansial perusahaan, akan tetapi memiliki dampak signifikan bagi keberlangsungan usaha. Menurut (Chen & Zhao, 2021), investor menaruh perhatian pada aspek non keuangan karena nonfinansial lebih merepresentasikan nilai-nilai di masa depan.

Program yang berhubungan dengan nonfinansial tersebut akan dilaporkan pada *sustainability reporting*. *Sustainability reporting* yaitu laporan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan transparansi mengenai keberlanjutan mencakup lingkungan tempat beroperasi, aspek tata kelola perusahaan, serta aspek lain seperti keuangan, sosial, dan lingkungan perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya kepada

Stakeholders. Konsep adanya *sustainability reporting* merupakan pengembangan dari konsep dasarnya yaitu *Triple Bottom Line* dimana teori ini pengembangan lebih lanjut dari teori sebelumnya yaitu *sustainable development* (Sutawa & Sisdyani, 2022;Elkington, 1997). Kompleksitas analisis aspek non keuangan disebabkan ruang lingkup yang sangat luas apabila dibandingkan dengan aspek keuangan. Terjadinya perubahan sikap para pemangku kepentingan yang lebih memperhatikan aspek nonfinansial membawa pertanda perubahan positif bagi keberlangsungan perusahaan. Fenomena ini membantu para manajemen dalam menyelaraskan strategi maupun tujuan perusahaan (Domi dkk., 2022).

Menurut (Ananda & Sisdiyanto, 2024;Ditta, 2022), keberlanjutan perusahaan tidak hanya bergantung pada hasil laporan laba rugi, tetapi melibatkan faktor yang lebih kompleks seperti faktor eksternal. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Edelman Trust Barometer tahun 2023, sebanyak 93% orang yakin bahwa perubahan iklim menimbulkan ancaman yang sangat serius dan mendesak bagi keberlangsungan bumi. Ancaman tersebut menimbulkan kecemasan dari berbagai pihak karena dapat menyebabkan kerugian besar, terganggunya operasional bisnis, dan terjadinya pergeseran dalam konteks sosial-ekonomi secara cepat (Ebi dkk., 2021).

Indonesia berusaha untuk mengantisipasi dan memitigasi ancaman tersebut. Pada tahun 2007, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT). Pada pasal 1 ayat 3

menjelaskan bahwa pemerintah mewajibkan para perusahaan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari aktivitas operasional mereka dengan melaksanakan program CSR (Syailendra & Laurencia, 2023). Tahun 2021 pemerintah telah menerbitkan peraturan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang “Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan”, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dengan diterbitkan peraturan tersebut, maka penerbitan *sustainability report* menjadi *mandatory* (Rudyanto, 2021).



Gambar 1.1 Tren Peningkatan Penerbitan *Sustainability Reporting* Perusahaan Manufaktur

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1 yang tersaji dari tahun 2016 hingga 2023 tentang tren peningkatan *sustainability reporting* pada 34 perusahaan manufaktur, terlihat adanya tren kenaikan secara signifikan. Pada grafik berwarna merah menunjukkan tahun dimana peraturan POJK dikeluarkan. Tren kenaikan ini menunjukkan perubahan positif. Perubahan signifikan dapat dirasakan setelah penerapan peraturan tersebut. Pada tahun 2016 sebelum adanya peraturan mengenai pelaporan tersebut, hanya terdapat 2 perusahaan yang melaporkannya. Pada saat tahun peraturan

tersebut dilaporkan hanya terdapat 3 perusahaan yang melaporkan. Tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 sampai 2020 terjadi peningkatan tetapi masih minim pengungkapan dikarenakan tahun tersebut adalah masa transisi setelah diterapkannya pelaporan. Peristiwa besar juga terjadi pada sekitar tahun 2020 dan 2019 yaitu terjadi pandemi yang membuat keberlangsungan perusahaan terancam, sehingga beberapa perusahaan tidak melaporkannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa perusahaan merasa bahwa peraturan pengungkapan *sustainability report* menyulitkan perusahaan dan keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari biaya pembuatannya (Nishitani dkk., 2021). Lalu pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023 perusahaan secara konsisten melaporkannya.



Gambar 1.2 Tren Peningkatan Penerbitan Sustainability Reporting Perusahaan Energi

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Peraturan yang telah diterbitkan mendorong para perusahaan untuk berkontribusi dalam pelaporan keberlanjutan. Berdasarkan grafik pada gambar 1.2 yang tersaji dari tahun 2014 hingga 2023 tentang tren peningkatan *sustainability reporting* pada 35 perusahaan energi, terlihat

adanya tren kenaikan secara signifikan. Pada grafik berwarna merah menunjukkan tahun dimana peraturan POJK dikeluarkan. Tren kenaikan ini menunjukkan perubahan positif. Pada tahun 2014-2016 sebelum adanya peraturan mengenai pelaporan tersebut, hanya sedikit perusahaan yang melaporkannya. Pada saat tahun peraturan tersebut dilaporkan hanya terdapat 12 perusahaan yang melaporkan, kenaikan tersebut dapat dikatakan cukup baik apabila tahun sebelumnya. Tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 sampai 2020 terjadi peningkatan tetapi masih minim pengungkapan dikarenakan tahun tersebut adalah masa transisi setelah diterapkannya pelaporan. Peristiwa besar juga terjadi pada sekitar tahun 2020 dan 2019 yaitu terjadi pandemi yang membuat keberlangsungan perusahaan terancam, sehingga beberapa perusahaan tidak melaporkannya.

Hal ini disebabkan oleh beberapa perusahaan merasa bahwa peraturan pengungkapan *sustainability report* menyulitkan perusahaan dan keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari biaya pembuatannya (Nishitani dkk., 2021). Lalu pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023 perusahaan secara konsisten melaporkannya. Tidak hanya pada grafik pengungkapan perusahaan manufaktur, kejadian tersebut juga terjadi pada perusahaan energi. Laporan ini menjadi bukti komitmen para perusahaan untuk ikut serta berkontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan berkelanjutan (Jayantini, 2023). Perusahaan mulai tersadar bahwa praktik berkelanjutan berkontribusi besar dalam membentuk

hubungan dengan para stakeholder dan meningkatkan reputasi perusahaan, di luar keuntungan finansial langsung (Suhartini dkk., 2024).

Urgensi dari penerapan pembangunan berkelanjutan semakin besar dan meningkatkan tekanan yang diterima oleh perusahaan (Naseer dkk., 2025). Menurut (Sharaf-Addin, 2024), sejak tahun 2000 pemerintah dan organisasi internasional telah memulai langkah-langkah untuk menyelaraskan pelaporan nonfinansial. Menghadapi tantangan tersebut, PBB merumuskan 5 pilar yang merupakan evolusi dari *triple bottom line* (*people, planet, profit*), yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace*, dan *Partnership* yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam pengembangan laporan keberlanjutan yang disusun sesuai dengan standar GRI (Wisnumurti & Setiawan, 2024). GRI (*Global Reporting Initiative*) merupakan pedoman yang berisi indikator mengenai bagaimana perusahaan melaporkan dampak ekonomi di tempat perusahaan tersebut beroperasi, aspek sosial, serta isu lingkungan dari operasional perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Chai & Suparman, 2022). Pada tahun 2021 GRI telah diperbarui dengan versi terbaru yaitu GRI *Universal Standards* dan secara efektif diberlakukan pada tahun 2023.

Transisi tersebut searah dengan peningkatan transparansi pada kegiatan operasional perusahaan yang dilaporkan. Perusahaan telah menerima desakan dari berbagai macam pemangku kepentingan (*stakeholder*). Desakan tersebut tidak hanya berasal dari eksternal perusahaan tetapi juga terdapat unsur keterlibatan dari sisi internal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ucuzoglu & Steinmann, 2023) atas nama Deloitte, melaporkan data terkait *sustainability reporting*, termasuk tekanan yang dihadapi dari berbagai pemangku kepentingan. Laporan tahun 2022 menunjukkan pemerintah berada di peringkat pertama, diikuti oleh manajemen, dan konsumen berada di posisi terakhir. Pada tahun 2023, manajemen menjadi sumber tekanan utama, diikuti pemerintah, lalu konsumen. Sementara itu, Laporan Deloitte tahun 2024 menyebutkan bahwa tekanan terbesar berasal dari pemerintah atau regulasi, diikuti oleh manajemen, dan terakhir konsumen. Dengan kata lain, pemerintah, manajemen, dan *customer* merupakan pemangku kepentingan yang memiliki hubungan paling signifikan dengan *sustainability reporting*.

Pemerintah mendapat peringkat pertama atau menjadi pemberi tekanan yang paling besar selama 2 tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya regulasi yang bersifat mutlak dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di suatu negara harus menaatinya. Dalam *sustainability reporting*, pemerintah memiliki peran penting dalam mengenalkan lebih jauh mengenai pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Khair & Sartika, 2024). Pemerintah telah mengambil berbagai langkah agar dapat menstimulasi ekonomi hijau sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Bisultanova, 2023). Oleh karena itu, kebijakan fiskal hijau, investasi, dan penciptaan lapangan kerja mengintegrasikan antara pelaku kelembagaan, kebijakan hijau, kewirausahaan ekologi, dan inovasi teknologi hijau agar terciptanya pembangunan

ekonomi berkelanjutan (Wang dkk., 2022). Adanya dorongan pemerintah melalui regulasi tersebut membuat tekanan yang dirasakan oleh perusahaan dalam penerbitan *sustainability report*.

Pihak eksternal lain yang memberikan tekanan terbesar pada perusahaan adalah pelanggan atau *customer*. *Customer* merupakan salah satu penunjang keberlangsungan operasional perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan berbagai macam strategi agar dapat mempertahankan *customer* yang dimiliki. Salah satu cara agar dapat mempertahankannya adalah dengan memberikan kepuasan secara penuh. Ekspektasi tinggi inilah yang membentuk tekanan untuk sebuah perusahaan. Ekspektasi yang diberikan bukan hanya mengenai pelayanan tetapi juga transparansi dan lain-lain. Tekanan pelanggan yang berhubungan dengan persyaratan lingkungan atau isu lain yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan dapat memberikan dorongan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan inisiatif dan kepeduliannya terhadap lingkungan, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja lingkungan serta daya saing (Onjewu dkk., 2023). Tekanan pelanggan secara signifikan memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk mengungkapkan praktik keberlanjutan.

Pemerintah dan *customer* sebagai representasi dari pihak eksternal, menunjukkan bahwa pihak eksternal dapat memberikan tekanan tinggi pada perusahaan. Kajian yang telah dilakukan oleh (Ramadhan dkk., 2024) menunjukkan hubungan positif antara *customer* dan pemerintah dengan *sustainability reporting*. Namun, terdapat inkonsistensi pada penelitian lain.

Temuan lain dikemukakan oleh (Qisthi & Fitri, 2020) yang menunjukkan bahwa adanya pemerintah tidak berdampak terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan dkk., 2020) menyatakan bahwa keterlibatan dari pelanggan tidak mempengaruhi pengungkapan *sustainability reporting*.

Tidak hanya pihak eksternal, Tekanan juga dirasakan dari pihak internal. Dimana hal ini dapat dirasakan dari pihak manajemen. Pihak manajemen atau anggota dewan merupakan pihak yang akan memastikan perusahaan telah cukup dalam menerapkan tata kelola yang baik. Agar dapat terlaksananya, hal ini dapat dilakukan apabila perusahaan memiliki anggota dewan yang independen. Anggota yang memiliki independensi tersebut dapat melihat secara objektif tanpa memihak. Pada *sustainability report*, anggota dewan yang *independent* membantu pengawasan dan pengelolaan laporan secara efektif (Rachmadanty & Agustina, 2023). Kondisi ini terjadi karena tujuan dari anggota *board independent* adalah adanya keputusan yang menguntungkan dalam jangka panjang daripada berfokus pada keuntungan yang didapatkan dalam jangka pendek sehingga dapat mempertahankan kinerja pembangunan berkelanjutan perusahaannya. Menurut (Noor dkk., 2024), adanya *board independent* menunjukkan bahwa manajemen yang efektif memastikan bahwa manajerial perusahaan bertindak sesuai dengan kehendak para *stakeholders*. Dewan ini memiliki peran besar untuk memastikan

informasi yang diberikan kepada pihak eksternal memuat transparansi dan tanggung jawab.

Dalam tata kelola yang baik, perusahaan harus menentukan ukuran dewan yang dimiliki. Pembentukan dewan didapat dari keseluruhan anggota dewan yang ada dalam sebuah perusahaan (Melania & Tjahjono, 2022). Semakin besar *Board size* maka semakin optimal pengawasan di dalam perusahaan (Davinda dkk., 2021). Jumlah anggota dewan dalam perusahaan meningkatkan efisien dalam pelaksanaan pelaporan dan akan membantu dalam peningkatan sistem pelaporan pada perusahaan (Davinda dkk., 2021). Dengan pengawasan yang lebih optimal dan sistem yang lebih terarah akibat *board size*, tentunya hal tersebut berpengaruh pada penerbitan *sustainability reporting*, sehingga dengan banyaknya dewan direksi maka didapatkan lebih banyak perspektif mengenai pelaporan dan transparansi.

Berbagai penelitian empiris mengenai hubungan *sustainability reporting* dengan *board size* dan *board independent*. Penelitian yang dilakukan oleh (Lewa dkk., 2024) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara hubungan *board size* dan *board independent* dengan *sustainability report*. Namun, penelitian lain dilakukan oleh (Ekaputri & Eriandani, 2022) menunjukkan inkonsisten hasil penelitian. Terjadinya penolakan pada hubungan *board independent* dan *sustainability reporting*. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Chai & Suparman, 2022) mengungkapkan bahwa terdapat penolakan pada

hubungan *board size* dengan *sustainability report*. Adanya inkonsisten hasil penelitian yang mengharuskan adanya penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut.

Penambahan kedua variabel tersebut dilakukan agar dapat melakukan penelitian lebih jauh mengenai tekanan yang diperoleh pihak perusahaan karena tekanan tersebut didapatkan dari pihak eksternal maupun internal. Adanya variabel *board size* dan *board independent* merupakan variabel yang mewakili tekanan dari pihak internal. Selain itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berlandaskan pada negara Africa dan America Latin, sehingga hal ini dapat menjadi perbedaan dan dapat dijadikan pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan.

Latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijadikan landasan untuk analisis hubungan antara pemangku kepentingan seperti keterlibatan pelanggan, keterlibatan pemerintah, *board size*, dan *board independent* pada *sustainability report*. Penelitian ini akan berjudul **“Peran Stakeholders Pressure Terhadap Sustainability Reporting Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur dan Energi di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pembahasan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini yang selanjutnya akan dirumuskan menjadi rancangan hipotesis:

1. Apakah keterlibatan pelanggan berpengaruh terhadap *sustainability report disclosure*?

2. Apakah keterlibatan pemerintah berpengaruh terhadap *sustainability report disclosure*?
3. Apakah *board size* berpengaruh terhadap *sustainability report disclosure*?
4. Apakah *board independent* berpengaruh terhadap *sustainability report disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh keterlibatan pelanggan terhadap *sustainability report disclosure*
2. Untuk menguji pengaruh keterlibatan pemerintah terhadap pengungkapan *sustainability report disclosure*
3. Untuk menguji pengaruh *board size* dengan *sustainability report disclosure*
4. Untuk menguji pengaruh *board independent* dengan *sustainability report disclosure*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil yang telah dijelaskan diharapkan memiliki dampak positif bagi para perusahaan terutama di sektor manufaktur dan energi agar dapat lebih memperhatikan keterlibatan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Terutama investor yang harus memastikan bahwa

sebelum mengambil keputusan, perusahaan tersebut memiliki citra yang baik karena telah melakukan tanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada para pemangku kepentingan.

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Penambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai *sustainability reporting*. Dimana hasil penelitian ini lebih mengacu pada *stakeholders perspektif*. Dengan kata lain, peneliti dimasa mendatang diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini dengan objek yang berbeda atau penambahan variabel penelitian.
2. Penambahan wawasan akuntansi yang diterima oleh para mahasiswa pada saat perkuliahan. Mahasiswa perlu memahami bahwa dunia akuntansi tidak hanya mencakup perihal keuangan. Keilmuan akuntansi memiliki cakupan tak terhingga. Hasil temuan pada penelitian, diharapkan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai keilmuan akuntansi.